

INTERSEPSI SEBAGAI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

WAHYUDI, SLAMET TRI

Pembimbing : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

LAW

KKB KK-2 05 / 11 Wah i

Copyright © 2010 by Airlangga University Library Surabaya

RINGKASAN

Tesis ini membahas tentang konsekuensi yuridis implementasi intersepsi kepolisian yang bertentangan dengan undang-undang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Intersepsi merupakan kewenangan penegak hukum, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Implementasi intersepsi terdapat perbedaan yang mendasar antara Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK, perbedaan tersebut antara lain tentang pengaturan dimulainya kegiatan intersepsi. Sebelum diundangkannya UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, hasil intersepsi yang berupa rekaman percakapan telpon dimasukkan dalam klasifikasi sebagai alat bukti petunjuk, hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 26 jo Pasal 188 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, namun setelah diundangkannya UU ITE rekaman pembicaraan tersebut masuk dalam kualifikasi alat bukti elektronik yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Selanjutnya terdapat pemahaman yang keliru terhadap pengaturan RPP Penyadapan, dalam ketentuan RPP Penyadapan standar operasional KPK diatur tersendiri dalam undang-undang, maka secara hirarkie peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan pemerintah dibawah ketentuan undang-undang, sehingga intersepsi yang dilakukan oleh KPK kelak tidak harus serta merta tunduk dan patuh terhadap pengaturan RPP tentang penyadapan.

Adanya fakta hukum tentang pelaksanaan intersepsi yang dilakukan oleh kepolisian yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adapun alasan yang dijadikan dasar bagi kepolisian adalah penafsiran ekstensif terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE, dalam hal ini prespektif kepolisian, bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU ITE terkait dengan kewenangan intersepsi adalah *lex specialis*, maka dari itu pihak kepolisian menafsirkan bahwa UU ITE memperbolehkan kepolisian untuk melakukan intersepsi terhadap semua tindak pidana. Setelah dilakukan penafsiran historis terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE tersebut, ternyata maksud dari Pasal tersebut adalah implementasi intersepsi yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan KPK dikembalikan pada undang-undangnya masing-masing. Kemudian apabila dikualifisir tindakan kepolisian tersebut adalah tindakan tanpa hak atau bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum materiil. Selanjutnya konsekuensi yuridis dari tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana, hal ini didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap Pasal 31 ayat (3), bahwa bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi, maka konsekuensi yuridisnya adalah dipersamakan dengan masyarakat biasa yang melakukan intersepsi. Sehingga tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal sebelumnya yakni Pasal 31 ayat 1 jo Pasal 47 UU ITE.

Demikian tesis ini semoga dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan di bidang hukum bagi pembacanya.

ABSTRACT**INTERCEPTION AS POLICE AUTHORITY IN LAW ENFORCBMENT**

This thesis discussed about juridical consequence of police interception implementation that conflicting with the law. Research method in this research was nofinitive law study, with using some approaches such as, regulation approach, conceptual approach and historical approach. Interception is the authority of law enforcers such as the police, attorney and KPK that was regulated in the regulation. Furlher in implementation of interception there were some basic differences between KPK and Police force and Attorney, that differences are in the arrangement of interception activity starting.. Before the enactment of Act No. li year of 2008 about ITE, the interception result in the form of telephone conversation recording was included in the classification as indicating proof, it was based on provision that asserted in Act No. 20 Year of 2001 Article 26 jo Arlicle 188 subsection (2) arlicle (a) and (b), but after the enactment of Act No.11 year of 2008 about ITE the interception result in the form of talking record included in the qualification of legal electronic proof, and it is based on provision of Article 5 subsection (1). Then in the regulation about interception operational standard contains erroneous understanding toward the tapping RPP regulation, in the RPP provision of operational standard tapping, KPK must comply with that RPP regulation, but in the reality the KPK operational standard was regulated in the specific regulation, where in hierarchy the regulations, provision of government regulation are under the Act provision, therefore the implementation of interception that is done by KPK in the future is must not be complying with the RPP provision about tapping.

In reaity, there was law fact about interception implementation that was done by police force that conflicting with law provisions, the reason that underlying it was extensive interpretation on Article 33 subsection (3) Act No.11 year of 2008 about ITE, in this matter the existing perspective of police force, that the stated regulation in Act of ITE that related with interception authority is *lex specialis*, because *lex specialis* thereby the police interpreted that ITE Act allowing police force to do interception to any kind of criminal action. After the historical interpretation was done toward Article 31 subsection (3) above, in fact the meaning of that Article is the implementation of interception that is done by police force, attorney and KPK must be based on their related law/regulation. If it is qualified the action of police force is the ilegal action or could be categorized as the action against material law. Then the juridical consequence from police force action could be given with criminal sanction, it was based on the systematic interpretation on Article 31 subsection (3), for the law enforcer who doing any deviation or it means they are who did not based their interception authority as indicated in law, therefore the juridical consequence is same with civil citizen that doing interception as referred to in Article 31 subsection (1). Therefore the action of police force could be given with criminal sanction as asserted in previous Article namely Article 31 subsection 1 UU of ITE.

Thus this thesis may it will be a useful reading material and add the knowledge about law for the reader.

Keyword : LAW ENFORCEMENT